

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Evaluasi

2.1.1.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian terhadap sebuah data yang dikumpulkan melalui asesmen. Data yang dikumpulkan tersebut dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan dengan data yang telah diperoleh melalui pengukuran, baik menggunakan instrumen tes maupun non tes. Secara harfiah evaluasi berasal dari kata *evaluation* dalam bahasa Inggris. Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan Istilah bahasa Indonesia “evaluasi”.

Evaluasi secara etimologi, evaluasi artinya penilaian, sehingga mengevaluasi adalah memberi nilai atau menilai. Sedangkan secara terminologi, menurut Arikunto, evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian evaluasi itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang sudah terlaksana dan hasil evaluasi menentukan suatu nilai dan kualitas.

Menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985, hlm. 159), evaluasi adalah suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung jawaban, serta meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang ada. Menurut penjelasan sebelumnya, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan menurut Komite Studi Nasional tentang Evaluasi (*National Committee on Evaluation*) dari UCLA (Stark & Thomas, 1994, hlm. 12), evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis,

dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya.

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan, Alkin (1969, hlm. 19) dan Stufflebeam (1971, hlm. 19). Provus (1969, hlm. 19) dan Rivlin (1971, hlm. 19) menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan membandingkan data tentang penampilan orang-orang dengan standar yang telah diterima umum. Marcolm dan Provus (1971, hlm. 19) sebagai pencetus gagasan *Discrepancy Evaluation* (1971, hlm. 9) dalam buku berjudul menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui perbedaan antara apa yang ada dengan suatu standar yang telah ditetapkan serta bagaimana menyatakan perbedaan antara keduanya. Eisner (1976, hlm. 19) mengemukakan bahwa evaluasi adalah memutuskan suatu program secara kritis dengan menggunakan jasa keahlian.

Sementara itu, menurut Rapph Tyler sebagaimana yang dikutip oleh Farida Yusuf Tayibnalis dalam buku *Evaluasi Program* mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan dalam setiap program dapat tercapai. Pengertian evaluasi menurut Soedijanto (1996), adalah sebuah proses yang terdiri dari urutan rangkaian kegiatan mengukur dan menilai. Optimalisasi sistem evaluasi menurut Mardapi (2003, hlm. 12) memiliki dua makna, yaitu sistem evaluasi yang memberikan informasi yang optimal dan manfaat yang dicapai dari evaluasi.

Micahel Scriven mengemukakan bahwa secara garis besar fungsi penelitian evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yakni:

1. Evaluasi formatif difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu pendidikan masih berlangsung. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membentuk (*to form*) dan memodifikasi program kegiatan. Jika pada pertengahan kegiatan sudah diketahui hal-hal apa yang negatif dan para pengambil keputusan sudah dapat menentukan sikap tentang kegiatan yang sedang berlangsung maka terjadinya pemborosan yang mungkin akan terjadi dapat dicegah.

2. Evaluasi sumatif dilangsungkan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana sesuatu suatu program memiliki nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Penilaian sumatif bermanfaat datanya bagi para pendidik yang akan mengadopsi program yang dievaluasi berkenaan dengan hasil, program dan prosedur.

Bila ditinjau dari waktu pelaksanaan evaluasi, William Dunn (1981, hlm. 117-120) menyebut kedua fungsi ini bersifat prospektif dan retrospektif. Sifat prospektif evaluasi berkaitan dengan fungsi formatif yang memberikan informasi sebelum dan saat program berlangsung. Sedangkan untuk sifat retrospektif terkait dengan fungsi sumatif evaluasi yang memberikan informasi sesudah program yang telah dilaksanakan.

Brikerhoff (1986, hlm. 9), menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Menurut Brikerhoff (1986, hlm. 9), dalam pelaksanaan evaluasi ada tujuh elemen yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan fokus yang akan dievaluasi (*focusing the evaluation*);
2. Penyusunan desain evaluasi (*designing the evaluation*);
3. Pengumpulan informasi (*collecting information*);
4. Analisis dan intepretasi informasi (*analyzing and interpreting*);
5. Pembuatan laporan (*reporting information*);
6. Pengelolaan evaluasi (*managing evaluation*);
7. Evaluasi untuk evaluasi (*evaluating evaluation*).

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan evaluasi, evaluator pada tahap awal harus menentukan fokus yang akan dievaluasi dan desain yang akan digunakan. Hal ini berarti harus ada kejelasan apa yang akan dievaluasi yang secara implisit menekankan adanya tujuan evaluasi serta adanya perencanaan bagaimana melaksanakan evaluasi. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data, menganalisis dan membuat intepretasi terhadap data yang terkumpul serta membuat laporan.

Selain itu, evaluator juga harus melakukan pengaturan terhadap evaluasi dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam melaksanakan evaluasi secara keseluruhan.

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian (*test, measurement, and assessment*). Tes adalah salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan (Djemari Mardapi, 1999, hlm. 2). Pengukuran dinyatakan sebagai proses penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya menurut aturan tertentu (Ebel & Frisbie, 1986, hlm. 14). Penilaian memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi. *The Task Group on Assessment and Testing* (TGAT) mendeskripsikan asesmen sebagai semua cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok (Griffin & Nix, 1991, hlm. 3).

Evaluasi juga merupakan proses mengumpulkan data yang sistematis untuk mengetahui efektifitas program pendidikan dan pelatihan. Adapun program diartikan segala sesuatu yang dilakukan dengan harapan akan mendapatkan hasil atau pengaruh. Menurut Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin (2004, hlm. 2) terdapat dua pengertian istilah secara umum dan khusus. Menurut pengertian, program diartikan sebagai rencana. Sedangkan pengertian secara khusus, program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Definisi lain di kemukakan oleh Tayibnapi (2000, hlm. 9) yang mengartikan program merupakan segala sesuatu yang coba dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Ada tiga pengertian dalam menentukan program, yaitu realisasi dan implementasi suatu kebijakan, terjadi dalam waktu yang relative lama bukan kegiatan tunggal, tetapi jamak berkesinambungan, dan terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. "*A programme is collection of interrelated*

project designs to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjetives". Program adalah kumpulan proyek-proyek yang telah terancang untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang harmonis dan berintegritas untuk mencapai sebuah sasaran kebijaksanaan secara keseluruhan.

Jadi evaluasi program sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Evaluasi program juga diartikan sebagai proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan, sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik. Evaluasi program juga merupakan proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan beberapakriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Evaluasi program pelatihan lebih diarahkan untuk memberikan masukan bagi pengelola, orang yang berkepentingan serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelatihan dan pengembangan SDM pertanian khususnya penyuluh pertanian. Pendekatan yang sesuai dengan evaluasi ini adalah *jugmental approach*, yang merupakan pendekatan secara eksplisit menekankan pada pertimbangan sebagai suatu prosedur kritis dalam pelaksanaan pelatihan. Dalam pendekatan ini, evaluator atau peneliti berperan penting sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak pengambil kebijakan.

Evaluasi program pendidikan luar sekolah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan suatu program pendidikan Syamsu Mappa (1984, hlm. 21) dalam buku. Sedangkan menurut Stake(1975, hlm. 21) menggambarkan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk merespon suatu program yang telah, sedang dan akan

dilaksanakan. Strake mengemukakan bahwa evaluasi program pendidikan berorientasi langsung pada kegiatan dalam pelaksanaan program evaluasi dilakukan untuk merespon pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai program tersebut.

Paulson dalam bukunya “ *A Strategy for Evaluation Design*”, yang dikutip oleh Grotelueschen (1976, hlm. 17) dalam buku berjudul, mengemukakan bahwa “ *Evaluation as a process of examining certain objects or event in the light of specific value standards for the purpose of making adaptive decisions*”. Menurut Paulson evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran nilai-nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Berdasarkan pengertian ini maka evaluasi program adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu fakta atau kenyataan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

Evaluasi program adalah upaya pengumpulan informasi mengenai suatu program, kegiatan, atau proyek informasi tersebut berguna bagi pengambilan keputusan, antara lain untuk memperbaiki program, menyempurnakan kegiatan program lanjutan, menghentikan suatu program atau memperluas gagasan yang mendasari suatu program atau kegiatan. Informasi yang dikumpulkan harus memenuhi persyaratan ilmiah, praktis, tepat guna, dan sesuai dengan nilai yang mendasari dalam setiap pengambilan keputusan Menurut Mugiadi (1980, hlm. 21).

Evaluasi program menurut Cronbach dan Stufflebeam adalah upaya dalam menyediakan informasi untuk disampaikan kepada para pengambil keputusan dan menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program (Cronbach, 1982). Sedangkan Definisi lain mengenai evaluasi program datang dari *Joint Committee on Standards for Educational Evaluation* (1981) yang mengatakan bahwa evaluasi program merupakan evaluasi yang menilai suatu aktivitas kegiatan dengan menyediakan sebuah data yang berkelanjutan.

Menurut (Denzin & Lincoln, 2000, hlm. 83) mengemukakan bahwa evaluasi program berorientasi pada sekitar perhatian oleh penentu kebijakan dari penyandang dana secara karakteristik memasukkan pertanyaan penyebab tentang program mana yang telah mencapai tujuan yang diinginkan. Keputusan-keputusan yang diambil dijadikan sebagai indikator-indikator penilaian kinerja atau *assessment performance* pada setiap tahapan evaluasi dalam tiga kategori, yaitu rendah, moderat, dan tinggi. Berangkat dari pengertian sebelumnya, maka evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan, sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan. Evaluasi dapat digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program berkaitan dengan program lingkungan dengan suatu "*judgement*" apakah program dapat diteruskan, ditunda, ditingkatkan, dikembangkan, diterima, atau ditolak.

Dapat disimpulkan dari seluruh penjelasan sebelumnya bahwa evaluasi pada dasarnya dibutuhkan dalam setiap program untuk mengetahui keberhasilan dan kemajuannya serta sasaran apakah sudah tercapai atau belum dan hasilnya nanti dapat diperbaiki menjadi lebih baik dari pada program sebelumnya ketika evaluasi dilakukan maka akan terlihat faktor-faktor apa saja yang perlu dipertahankan, diperbaiki atau dihilangkan sama sekali.

2.1.1.2 Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi berfungsi sebagai pengarah kegiatan evaluasi program dan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kegiatan evaluasi program tersebut. Menurut Weiss (1972, hlm. 4) bahwa tujuan evaluasi adalah "*The purpose of evaluation research is to measure the effect of program against the goals it set out accomplish as a means of*

contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming”.

Ada empat hal yang harus ditekankan pada tujuan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Menunjuk pada penggunaan metode penelitian;
2. Menekankan pada hasil suatu program;
3. Penggunaan kriteria untuk menilai;
4. Kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang.

Adapun tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

Tujuan evaluasi terdiri atas tujuan umum (*goals*) dan tujuan khusus (*objectives*). Tujuan umum dinyatakan dalam rumusan umum, sedangkan tujuan khusus dinyatakan dalam rumusan khusus dan terbatas, serta merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan evaluasi secara implisit telah terumuskan dalam definisi pengambil keputusan. Tujuan khusus mencakup untuk memberikan masukan tentang kebijaksanaan pendidikan, hasil program pendidikan, kurikulum, tanggapan masyarakat terhadap program, dan sebagainya.

Tujuan evaluasi program pendidikan luar sekolah bermacam ragam, diantaranya sebagai berikut :

1. Memberi masukan untuk perencanaan program

Dalam evaluasi program yang sedang di rencanakan biasanya digunakan analisis awal dan analisis akhir suatu program (*front-end*

analysis). Informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan adalah identifikasi kebutuhan, potensi dan kemungkinan hambatan program, evaluasi tentang kecocokan konsep yang digunakan, perkiraan biaya dan kelayakan program, serta proyeksi tentang perkembangan tututa kebutuhan serta saya dukung terhadap program.

Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data tentang hal-hal tersebut di atas sangat penting untuk menetapkan perencanaan dan pelaksanaan program. Perencanaan program adalah kegiatan pengelolaan bersama prang lain atua melalau orang laian, baik perorangan maupun kelompok, untuk menyusun program pendidika luar sekolah.

2. Memberi masukan untuk kelanjutan, perluasn dan penghentian program

Tujuan ini biasanya memalui evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan pada saat program sedang dilaksanakan. Adapun evaluasi ematif dilakukan setelah program berakhir, termasuk ke dalamnya adalah evaluasi terhadap pengaruh program (*summative or impact evaluation*). Evaluator sering berpendapat bahwa tujuan inilah yang perlu diutamakan dalam evaluasi program luar sekolah.

Apabila program sedang dilaksanakan, maka penting diadakan penilaian yang bersaaan dengan pemantauan (*monitoring*) untuk mengetahui ketepatan pelaksanaan program sesuai dengan rencana. Melalui evaluasi ini dapat diidentifikasi kebutuhan tentang perlunya perluasan program perbaikan program, peningkatan program, atau kemungkinan untuk melanjutkan program. Kebutuhan tersebut mungkin pula berkaitan dengan perlunya penghentian atau perubahan program.

Dalam beberapa hal, evaluasi program lebih mengutamakan keberhasilan program daripada evaluasi terhadap kegagalan program. Pada gilirannya hasil evaluasi terhadap keberhasilan program ungkin

dapat menjadi masukan untuk pengambilan keputusan tentang perlunya penghentian atau pengembangan program.

3. Memberi masukan untuk modifikasi program

Tujuan evaluasi program ini timbul dalam evaluasi formatif titik berat evaluasi program adalah upaya mendeskripsikan proses pelaksanaan program, bukan hasil program, dalam evaluasi terhadap proses pelaksanaan program, data tentang unsur-unsur program yang diidentifikasi.

4. Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program.

5. Memberi masukan untuk motivasi dan pembinaan pengelola dan pelaksana program. Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program.

2.1.2 Model Evaluasi CIPP

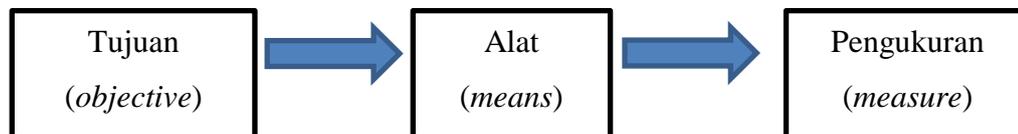
2.1.2.1 Pengertian Model Evaluasi CIPP

Secara umum evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu dan selanjutnya digunakan untuk menemukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Secara lebih khusus pengertian evaluasi diasosiasikan dengan efektivitas, efisiensi, keseimbangan dan keberlanjutan dari kegiatan, proses atau hasil atau uji kerja dalam bentuk suatu persepsi individu menjadi sasaran kegiatan dan bagi pembuatan keputusan sendiri (Arikunto, 2014).

Unsur-unsur pokok yang ada pada evaluasi yaitu yang pertama objek yang dinilai, yang kedua tujuan evaluasi, yang ketiga alat evaluasi, yang keempat proses evaluasi, yang kelima hasil evaluasi, yang ke enam standar atau tolak ukur, dan yang ke tujuh proses perbandingan antara hasil dengan tolak ukur (Musa, 1005, hlm. 8).

Evaluasi suatu program kegiatan bersifat sangat kompleks, melibatkan banyak unsur dan pertimbangan tertentu. Secara fungsi dan sistematik kegiatan evaluasi menyangkut tiga langkah pokok yang pertama

tujuan, yang kedua alat dan yang ketiga pengukuran. Secara visual dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kegiatan Evaluasi Program

Model merupakan suatu konsepsi teori yang dianut oleh evaluator dalam upaya memecahkan penelitian itu sendiri (Kuhn, 1970). Model pendekatan yang digunakan oleh evaluator menjadi landasan konseptual dalam pemecahan masalah dalam suatu model penelitian evaluatif. Salah satu model yang telah populer dan dominan kaitannya dengan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan, yaitu model evaluasi CIPP (*Conteks, Input, Process, and Product*) yang dikembangkan oleh stufflebean, dkk (1971).

Model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi program yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dan kawan-kawan di Ohio State University. Model evaluasi CIPP juga merupakan model evaluasi program yang terpusat untuk pengambilan keputusan. Model evaluasi CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, contohnya seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, serta dalam berbagai bidang/jenjang baik itu proyek, program, maupun institusi.

Model evaluasi CIPP adalah suatu proses yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang terdiri dari empat macam bentuk keputusan alternatif. Model evaluasi CIPP menggunakan kata *konteks, input, process, product*, sebagai sasaran evaluasi model ini memandang bahwa program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem (Arikunto, 2004, hlm. 29, Sukardi, 2014, hlm. 64).

CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen (*management oriented evaluation approach*) atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program (*evaluation in program management*). Model CIPP berpijak pada

pandangan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi program bukanlah membuktikan (*to prove*), melainkan meningkatkan (*to improve*). Karenanya, model ini juga dikategorikan dalam pendekatan evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program (*improvement-oriented evaluation*), atau bentuk evaluasi pengembangan (*evaluation for development*). Artinya, model CIPP diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi tersebut mendapatkan dan menggunakan masukan secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting atau, minimal, bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada.

Menurut Werimon (1992) evaluasi model CIPP berguna dalam pengambilan empat macam keputusan yaitu: Perencanaan (*planning decisions*), pengorganisasian (*structuring decisions*), pelaksanaan (*implementing decisions*), dan pengambilan keputusan baru (*recycling decisions*). Berdasarkan ciri dan kegunaan evaluasi model CIPP yang mensyaratkan adanya kegiatan evaluasi yang simultan terhadap proses dan produk, sehingga umpan balik yang menggambarkan kualitas produk dapat digunakan untuk memperbaiki proses agar dicapai produk yang lebih baik, di samping itu umpan balik dapat digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan untuk mencapai sebuah produk.

Evaluasi konteks (*context*) dimaksud untuk menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang, sehingga dapat membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, peluang, dan hasilnya. Evaluasi masukan (*input*) dapat dilaksanakan dalam menilai alternatif pendekatan, rencana tindak, rencana staf, dan pembiayaan bagi keberlangsungan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini berguna bagi pembuat kebijakan untuk memilih rancangan, bentuk pembiayaan, alokasi sumber daya, pelaksana, dan jadwal kegiatan yang paling sesuai bagi kelangsungan program. Evaluasi proses (*process*) ditunjukkan untuk menilai implementasi dari rencana yang telah

ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan dan kemudian akan dapat membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui kinerja program dan memperkirakan hasilnya. Evaluasi hasil (*product*) dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menilai hasil yang dicapai, diharapkan dan tidak diharapkan, jangka pendek dan jangka panjang, baik bagi pelaksana kegiatan agar dapat memfokuskan diri dalam mencapai sasaran program maupun bagi pengguna lainnya dalam menghimpun upaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Evaluasi hasil ini dapat dibagi ke dalam penilaian terhadap dampak (*impact*), efektivitas (*effectiveness*), keberlanjutan (*sustainability*) dan daya adaptasi (*transportability*) (Stufflebeam *et. al.*, 2003).

Model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) merupakan model evaluasi di mana evaluasi dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Evaluasi model CIPP merupakan konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki (Stufflebeam, H McKee and B McKee, 2003, hlm.118). Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Nana Sudjana dan Ibrahim (2004, hlm. 246) menterjemahkan masing-masing dimensi tersebut dengan makna sebagai berikut:

1. *Context*: situasi atau latar belakang yang mempengaruhi perencanaan program pembinaan.
2. *Input*: kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian program pembinaan.
3. *Process*: pelaksanaan program dan penggunaan fasilitas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
4. *Product*: hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan program tersebut.

Keunikan model ini adalah pada setiap evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Untuk lebih memahami mengenai CIPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. Stufflebeam menyatakan evaluasi konteks sebagai fokus institusi yang mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan (*discrepancy view*) kondisi nyata (*reality*) dengan kondisi yang diharapkan (*ideality*). Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Evaluasi konteks dapat memberi informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan dilakukan. Selain itu juga, evaluasi konteks juga bermaksud menjawab bagaimana rasionalnya suatu program.
2. Evaluasi input terdiri dari analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan, dan penjadwalan suatu program. Evaluasi masukan bermanfaat untuk membimbing pemilihan strategi program dalam menspesifikasikan rancangan prosedural. Informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada.
3. Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi suatu kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedural, baik tata pelaksana kejadian dan aktivitas. Setiap aktivitas harus dimonitor terkait perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas harian sangatlah penting, karena berguna bagi pengambil keputusan untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan.

Menilai sesuatu berdasarkan standar obyektif yang telah ditetapkan, kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi (Djaali Mulyono, 2000, hlm. 45). Tujuan evaluasi proses seperti yang dikemukakan oleh Worthen dan Sanders dalam Sawitri (2007, hlm. 24) menguraikan yaitu:

- a. Mengetahui kelemahan selama pelaksanaan termasuk hal-hal yang baik untuk dipertahankan;
 - b. Memperoleh informasi mengenai keputusan yang ditetapkan; dan
 - c. Memelihara catata-cacatan lapangan mengenai hal-hal penting saat implementasi dilaksanakan.
4. Evaluasi produk adalah kumpulan deskripsi dan “*judgment outcomes*” dalam hubungannya dengan konteks, input, dan proses, kemudian diinterpretasikan harga dan jasa yang diberikan. Evaluasi produk, yaitu suatu evaluasi dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Aktivitas evaluasi produk adalah mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Pengukuran dikembangkan dan diadministrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan sarana sesuai standar kelayakan. Secara garis besar, kegiatan evaluasi produk meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, membandingkannya antara kenyataan lapangan rumusan tujuan, dan menyusun penafsiran secara rasional.

Analisis produk ini diperlukan perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa skor tes, persentase, data observasi, diagram data, sosiometri dan sebagainya yang dapat ditelusuri kaitannya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif tentang mengapa hasilnya seperti itu. Keputusan-keputusan yang diambil dari

penilaian implementasi pada setiap tahapan evaluasi program diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu rendah, moderat, dan tinggi.

Sukardi (2009, hlm. 63-64) dalam bukunya menjelaskan bahwa evaluasi model CIPP pada garis besarnya melayani empat macam keputusan, yaitu sebagai berikut:

1. perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus;
2. keputusan pembentukan atau *structuring*, yang kegiatannya mencakup pemastian strategi optimal dan desain proses untuk mencapai tujuan yang telah diturunkan dari keputusan perencanaan;
3. keputusan implementasi, di mana pada keputusan ini para evaluator mengusahakan sarana prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode, strategi yang hendak dipilih;
4. keputusan pemutaran (*recycling*) yang menentukan, jika suatu program tersebut diteruskan, diteruskan dengan modifikasi, dan atau diberhentikan secara total atas dasar kriteria yang ada.

Worthen (2001) memprediksi bahwa evaluator tidak akan merangkul perencanaan strategis karena merugikan mereka. Evaluasi dan evaluator harus memainkan peran kunci dalam semua aspek informasi evaluatif dalam suatu organisasi, seperti dalam membangun kapasitas hasil, dalam mengelola sistem pengetahuan evaluatif, dan dalam menciptakan informasi evaluatif dan pengetahuan, termasuk melalui pelaksanaan studi evaluasi (John Mayne and Ray C. Rist, 2006). Fokus evaluasi untuk melaksanakan empat macam keputusan tersebut ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi konteks, menghasilkan informasi tentang macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya, agar tujuan dapat diformulasikan;

2. Evaluasi input, menyediakan informasi tentang masukan yang terpilih, butir-butir kekuatan dan kelemahan, strategi, dan desain untuk merealisasikan tujuan;
3. Evaluasi proses, menyediakan informasi bagi evaluator untuk melakukan prosedur monitoring terpilih yang mungkin baru diimplementasi sehingga butir yang kuat dapat dimanfaatkan dan yang lemah dapat dihilangkan;
4. Evaluasi produk, mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai dan juga untuk menentukan jika strategi yang berkaitan dengan prosedur dan metode yang diterapkan guna mencapai tujuan sebaiknya berhenti, dimodifikasi atau dilanjutkan dalam bentuk seperti sekarang (Sukardi, 2009, hlm. 64).

Keempat macam evaluasi tersebut divisualisasikan sebagai berikut, bentuk pendekatan dalam melakukan evaluasi yang sering digunakan, yaitu pendekatan eksperimental, pendekatan yang berorientasikan pada tujuan, yang berfokus pada keputusan, berorientasi pada pemakai dan pendekatan yang responsif yang berorientasi terhadap target keberhasilan dalam evaluasi.

Evaluasi sebagai proses menurut Stufflebeam 1969 dalam buku karangan Farida (2018, hlm. 14) , adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. *Contact evaluation*

Konteks evaluasi ini berfungsi untuk membantu merencanakan suatu keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh suatu program, serta untuk merumuskan tujuan program. Evaluasi konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum di penuhi, karakteristik populasi dan sampel dari individu yang dilayani serta tujuan program.

2. *Input evaluation*

Evaluasi ini untuk mengatur keputusan dan menentukan strategi apa yang akan diambil untuk mencapai kebutuhan yang akan dicapai dalam evaluasi program. Evaluasi ini membantu mengatur keputusan,

menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

3. *Process evaluation*

Evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan apa yang sudah menjadi rancangan dalam evaluasi program, yang nantinya akan ada monitor, kontrol, dan perbaikan.

4. *Product evaluation*

Evaluasi produk ini untuk menentukan keputusan berikutnya yang saja yang akan dicapai, apa yang akan dilakukan setelah program ini berjalan. Produk evaluasi juga merubah perilaku peserta serta memberikan dampak positif. Berkenaan dengan evaluasi kegiatan KWT Mawar Bodas di BPP dengan menggunakan model evaluasi CIPP, terdapat beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan context
 - Relevansi kebutuhan dalam kegiatan Kelompok wanita tani peserta.
- b. Berkaitan dengan input
 - 1) Bagaimana materi yang disampaikan oleh setiap penyuluh untuk KWT mawar bodas apakah sudah sesuai dengan kebutuhan.
 - 2) Bagaimana cara penyuluh menyampaikan materi.
- c. Berkaitan dengan proses
 - 1) Bagaimana partisipasi peserta dalam mengikuti dalam kegiatan Kelompok wanita tani di KWT mawar bodas.
 - 2) Bagaimana kualitas pelaksanaan dalam kegiatan Kelompok wanita tani.
 - 3) Bagaimana peran peserta dalam kegiatan Kelompok wanita tani.
- d. Berkaitan dengan produk
 - 1) Bagaimana manfaat dalam kegiatan Kelompok wanita tani untuk peserta.

- 2) Bagaimana keterampilan yang diperoleh peserta setelah mengikuti kegiatan KWT.

2.1.2.2 Tujuan Model Evaluasi CIPP

Tujuan evaluasi program model CIPP juga untuk keperluan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan/kebijakan. Tujuan utama dari evaluasi CIPP ini berhasil untuk menentukan sampai sejauh mana kurikulum yang sudah diterapkan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Diharapkan hasil evaluasi CIPP ini memberikan pengaruh program baik untuk kedepannya untuk bersifat langsung atau tidak langsung. Pengaruh inovasi kurikulum tersebut yang bersifat positif maupun negatif. Evaluasi ini biasanya diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi.

Tujuan lain dari evaluasi model CIPP ialah untuk menentukan sampai sejauh mana kurikulum yang diimplementasikan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Diharapkan hasil evaluasi ini memperlihatkan pengaruh program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengaruh inovasi kurikulum tersebut yang bersifat positif (biasanya evaluasi hasil hanya melihat pengaruh dari sudut pandang positif ini) maupun negatif. Evaluasi hasil ini diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi

2.1.2.3 Langkah-langkah Model Evaluasi CIPP

Secara umum langkah-langkah model evaluasi pendidikan meliputi tiga kegiatan utama yaitu persiapan, pelaksanaan dan pengolahan hasil. Dalam model evaluasi CIPP terdapat empat komponen yang harus dievaluasi yaitu *konteks, input, processs, product*. Evaluasi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Memfokuskan evaluasi;
2. Mendesain evaluasi;
3. Mengumpulkan informasi;
4. Menganalisis informasi;
5. Melaporkan hasil evaluasi.

Adapun beberapa langkah dalam melaksanakan model evaluasi CIPP, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan keputusan yang akan diambil;
2. Menetapkan jenis data yang diperlukan;
3. Pengumpulan data;
4. Menetapkan kriteria mengenai kualitas;
5. Menganalisis dan menginterpretasi data berdasarkan kriteria;
6. Memberikan informasi kepada pihak penanggungjawab program atau pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam pelaksanaan evaluasi haruslah sistematis, dimulai dari observasi terhadap objek yang akan dievaluasi, mengumpulkan informasi, menganalisis data, hingga memberikan kesimpulan sebagai proses terakhir dalam evaluasi.

2.1.2.4 Langkah-Langkah melaksanakan Evaluasi CIPP

1. Evaluasi *Conteks*

Untuk mengambil keputusan tentang pihak-pihak yang menjadi sasaran program, tentang tujuan program dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan atau pemanfaatan peluang, & tentang tujuan dalam kaitannya dengan pemecahan masalah, misalnya untuk merencanakan perubahan; & memberikan dasar untuk menilai hasil program.

2. Evaluasi *Input*

Untuk memilih sumber pendukung, strategi solusi & desain prosedur, misalnya untuk melakukan perubahan-perubahan secara tertata; dan memberikan dasar untuk menilai pelaksanaan program.

3. Evaluasi *Product*

Untuk melaksanakan dan menyempurnakan desain dan prosedur program, misalnya untuk mengawasi proses; & memberikan catatan tentang proses yang sebenarnya untuk menafsirkan hasil-hasil program.

4. Evaluasi *Process*

Untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, menghentikan, memodifikasi program, atau memfokuskan ulang pada perubahan; & memberikan catatan yang jelas tentang dampaknya (yang sesuai dengan maksud & tujuan awal atau tidak, yang positif atau negatif).

2.1.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Evaluasi CIPP

1. Kelebihan

- a. Memiliki pendekatan yang holistic dalam evaluasi yang bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail atau luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteks hingga saat proses penerapannya.
- b. Memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan sumatif sehingga sama baiknya dalam melakukan perbaikan selama program berjalan maupun memberikan informasi final.
- c. Lebih komprehensif atau lebih lengkap menyaring informasi.
- d. Mampu memberikan dasar yang baik dalam mengambil keputusan dan kebijakan maupun menyusun program selanjutnya.

2. Kekurangan

- a. Karena terfokus pada informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan stafnya, evaluator boleh jadi tidak responsif terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang signifikan.
- b. Hasil evaluasi ditunjukkan kepada para pemimpin tingkat atas, sehingga model ini bisa jadi tidak adil atau tidak demokratis.
- c. Model evaluasi CIPP itu kompleks dan memerlukan banyak dan, waktu, dan sumber daya lainnya.
- d. Terlalu tipdown dalam pendekatannya.

Dibandingkan dengan model-model evaluasi yang lain, model CIPP memiliki beberapa kelebihan antara lain, lebih komprehensif atau lengkap dalam menjangkau informasi, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata, tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan produk. Kelengkapan informasi yang dihasilkan evaluasi model CIPP akan mampu memberikan dasar yang lebih baik dalam mengambil keputusan, kebijakan, maupun penyusunan program-program selanjutnya.

Selain memiliki kelebihan, model CIPP memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini dalam bidang program pendidikan mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tanpa adanya kombinasi. Hal ini dapat terjadi, karena untuk mengukur konteks, masukan, maupun hasil dalam arti yang luas akan melibatkan banyak pihak yang akan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model evaluasi CIPP terdapat kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari evaluasi model evaluasi CIPP yaitu lebih kompleks dalam mengevaluasi suatu program, namun dalam evaluasi ini membutuhkan biaya dan waktu yang lebih.

2.1.3 Kelompok Wanita Tani (KWT)

2.1.3.1 Pengertian Kelompok Wanita Tani (KWT).

Menurut Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian Nomor. K/LP.620/147/X/92k, tanggal 8 Oktober 1992 tentang Pedoman Umum Pembinaan Wanita Tani dan Nelayan menyatakan bahwa kaum wanita yang berstatus selaku petani nelayan yang wanita (ibu, anak, mertua, kemenakan, dan lain-lain), yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut wanita tani adalah istri atau keluarga lain yang hidup dan mencukupi nafkahnya dari usaha tani.

Menurut Departemen Pertanian (1997), Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan istri petani atau wanita tani yang bersepakat membentuk suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan yang sama dalam membantu kegiatan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Kelompok Wanita Tani atau yang sering disingkat KWT, merupakan salah satu bentuk kelembagaan petani yang mana para anggotanya terdiri dari para wanita-wanita yang berkecimpung dalam kegiatan pertanian.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak hasil dan manfaat yang diperoleh dengan dibentuknya KWT, yaitu semakin cepatnya perembesan inovasi atau teknologi baru, semakin meningkatnya orientasi

pasar baik yang berkaitan dengan input maupun produk yang dihasilkannya, serta dapat memanfaatkan secara lebih optimal semua sumber daya yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk memudahkan koordinasi dan pembinaan wanita tani, maka dibentuklah suatu Kelompok Wanita Tani (KWT). Kelembagaan KWT ini dibentuk sebagai wadah para wanita tani agar dapat berhimpun, berusaha dan bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha bersama dalam kelompok.

KWT masih memiliki peranan penting dalam pengelolaan usaha tani termasuk dalam hal ini usaha pengolahan hasil pertanian. Usaha tersebut dilakukan disela-sela menunggu musim panen dan untuk menambah penghasilan bagi keluarganya. Tohir (1983) mengatakan bahwa kerja sama antara petani dan KWT ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berkembangnya koperasi kredit khususnya adalah berkat keaktifan dari KWT itu sendiri, karena merekalah yang menentukan akan keperluan kredit untuk tata rumah tangga keluarga maupun tata rumah tangga usaha tani. Eksistensi Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam analisis kelembagaan menurut Wahyuni (2003) penekanannya terletak pada proses interaksi antara dua individu atau lebih yang mencakup tiga kategori, yaitu aturan-aturan/kesepakatan, kinerja dinamika, dan hasil akhir. Eksistensi KWT akan terjaga apabila organisasi berjalan efektif. Menurut Muhyadi (1989) organisasi dikatakan efektif apabila memenuhi dua kriteria berupa mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan dan mampu mengelola siklus input proses output efisien.

Adapun karakteristik dari Kelompok Wanita Tani (KWT) bahwa salah satu dari kekuatan kunci KWT adalah kemampuannya untuk memberikan dampak positif pada kehidupan sosial anggotanya dan manfaat lanjutan bagi komunitas desa. Anggota KWT merasakan bagaimana keikutsertaan dalam KWT telah meningkatkan kualitas hidup mereka dan banyak yang merasa bahwa dampak sosial proyek tersebut merupakan hasilnya yang paling penting. Anggota KWT menghargai kesempatan untuk berbagi waktu dengan perempuan lain secara rutin. Mereka juga

menjelaskan bahwa fokus untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama adalah faktor yang menentukan kesuksesan kegiatan yang mereka lakukan (Strempe, 2011).

Food and Fertiliser Technology Centre (FFTC, 2007) menekankan pentingnya mengembangkan KWT sebagai strategi untuk mengembangkan akses wanita terhadap informasi, meningkatkan kemampuan mereka untuk ikut mengambil keputusan dan menciptakan kesempatan untuk membentuk kegiatan bersama dalam usaha mengakses masukan ekonomi. Menurut Mosher (1966), salah satu syarat pelancar pembangunan pertanian adalah adanya kerja sama kelompok tani, yaitu seperti KWT.

Kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan perkumpulan yang beranggotakan para petani wanita. Meskipun tidak semua petani mengikuti kegiatan ini. Ketua KWT dipilih dari salah seorang petani yang dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Ketua KWT yang terpilih diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain mengkoordinasikan kegiatan gotong-royong untuk pengolahan lahan anggota kelompok tani secara bergantian, mengkoordinasikan penjualan hasil produksi, dan melakukan hubungan dengan penyuluh maupun dinas pertanian.

KWT sebagai wadah organisasi dan bekerja sama antara anggota mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan jika ada permasalahan dilakukan secara bersamaan oleh kelompok wanita tani secara bersama-sama. Adanya kelompok wanita tani secara bersama-sama memecahkan permasalahan yang ada.

KWT sebagai perkumpulan para petani wanita yang tumbuh bersama-sama berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas uslan wanita tani dan kesejahteraan anggotanya (Departemen Pertanian RI 1997 dalam Samsi 2011, hlm. 15). Fungsi utama KWT berdasarkan adalah sebagai wahana dalam proses

belajar, wahana bekerja sama, dan wahana berproduksi. Apabila ketiga fungsi tersebut telah berjalan dengan baik, maka diarahkan untuk menjadi kelompok usaha.

Kegiatan awal yang dilakukan KWT dalam proses pengolahan lahan pekarangan adalah melakukan pengelolaan lahan pekarangan yang telah lama tidak digunakan dengan tumbuhnya rumput-rumput liar disekitar pekarangan, agar bisa dapat dimanfaatkan pekarangan rumah harus ditanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat serta ibu-ibu rumah tangga juga dapat melakukan kegiatan di luar rumah dengan bercocok tanam di pekarangan rumah. Tanaman yang cocok untuk ditanam oleh ibu-ibu rumah tangga ditemukan beberapa jenis sayuran dan tanaman obat keluarga (TOGA) seperti kunyit, jahe, bawang, sawi, cabe, kangkung, bayam, dan tumbuhan lainya yang dapat di panen lebih cepat.

Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai wadah kaum perempuan untuk bisa lebih aktif dalam pemanfaatan pekarangan rumah dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan pangan dalam rumah tangga. Partisipasi dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) diantaranya ibu rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian, dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam.

Seperti yang dikemukakan Ashari, dkk (2012) bahwa lahan pekarangan memiliki potensi dalam penyediaan bahan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian pangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pemanfaatan pekarangan melalui kelompok wanita tani sebagai bentuk pemberdayaan bagi ibu rumah tangga.

Melalui Kelompok Wanita Tani Mawar Bodas para ibu-ibu rumah tangga dapat saling berbagi informasi dan ilmu pengetahuan terkait budidaya pertanian untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Selain itu anggota kelompok wanita tani pun seringkali mendapatkan bantuan dari pemerintah

berupa penyuluhan pertanian dan bantuan sarana produksi pertanian. Tentunya hal tersebut sangat membantu dalam pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga

2.1.3.2 Fungsi

Sistem penyuluhan pertanian di Indonesia, Departemen Pertanian menetapkan bahwa kelompok tani memiliki tiga fungsi utama (Martaatmadja 1993, Martins, 1997, dan Departemen Pertanian, 1997 dalam Hariandi, 2011, hlm. 54), yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai unit belajar, adalah kelompok tani merupakan wadah belajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha sehingga produktivitas meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera;
2. Unit kerjasama, kelompok wanita tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok wanita tani dan antar kelompok wanita tani serta pihak lain, melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mamou menghadapi ancaman, tantangan dan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi;
3. Unit produksi, usaha kelompok wanita tani dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok wanira tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Menurut Departemen Pertanian 1997 (dalam Samsi, 2011, hlm. 5), apabila ketiga fungsi dijalankan dengan baik, maka diarahkan untuk menjadi unit kelompok usaha.

2.1.3.3 Tujuan

Tujuan dibentuknya kelompok wanita tani adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat kaum perempuan dalam usaha tani sebagai proses pembangunan masyarakat

dalam mencapai kesejahteraan. Dengan kelompok wanita tani masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kerjasama dalam kelompok sebagai tuuan meningkatkan usaha tani menjadi lebih baik.

Kelompok wanita tani dapat menjadi media intervensi bagi anggota dan masyarakat dalam mendukung usaha tani dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok. Selain itu kelompok wania tani ini melibatkan langsung kaum perempuan dalam hal pembangunan pertanian, perempuan ikut berperan penting dalam pengambilan keputusan. Dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait sangat diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan. Selain mengurus rumah tangga, perempuan dapat membantu suami dalam mencari nafkah dan mengurus lahan pertanian untuk menghidupi keluarganya.

Tujuan lain dari kelompok wanita tani yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan indah. Kegiatan kelompok wanita tani juga merupakan upaya dalam mensosialisasikan pola hidup yang produktif dan mengurangi kebiasaan masyarakat yang cenderung konsumtif terutama dalam hal kebutuhan bahan pangan.

2.1.4 Pemanfaatan Pekarangan Rumah

2.1.4.1 Pengertian Pemanfaatan Pekarangan Rumah

Salah satu cara untuk memperoleh ketersediaan pangan yang cukup diperlukan pemanfaatan segala sumber daya lahan yang ada secara baik dan terencana, termasuk lahan pekarangan. Di masyarakat (terutama di perdesaan), pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Lahan pekarangan, khususnya di perdesaan di Jawa, menurut Penny dan Ginting (1984) merupakan salah satu penggunaan tanah yang sangat penting. Namun, sebagian besar dari masyarakatnya hanya bersifat sambilan untuk mengisi waktu luang dan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Secara bahasa, pekarangan dapat didefinisikan sebagai sebidang tanah di sekitar rumah yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk

meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga. Pekarangan sering juga disebut sebagai lumbung hidup, warung hidup, atau apotik hidup. Dalam kondisi tertentu, pekarangan dapat memanfaatkan kebun di sekitar rumah.

Menurut Sajogyo (1994), pekarangan sering disebut lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup. Disebut lumbung hidup, karena sewaktu-waktu kebutuhan pangan pokok seperti beras, jagung, umbi-umbian, dan sebagainya tersedia dipekarangan. Bahan-bahan tersebut disimpan dalam pekarangan dalam keadaan hidup. Lalu selanjutnya, disebut sebagai warung hidup, karena dalam pekarangan terdapat sayuran yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, di mana sebagian rumah tangga harus membelinya dengan uang tunai. Sementara itu, disebut sebagai apotik hidup karena dalam pekarangan ditanami berbagai tanaman obat-obatan yang sangat bermanfaat dalam menyembuhkan penyakit secara tradisional.

Pekarangan adalah tanah di sekitar perumahan, kebanyakan berpagar keliling, dan biasanya ditanami padat dengan beraneka macam tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk keperluan sendiri sehari-hari dan untuk diperdagangkan. Pekarangan kebanyakan saling berdekatan, dan bersama-sama membentuk kampung atau desa Terra (2008).

Pekarangan adalah sebidang tanah darat yang terletak langsung di sekitar rumah tinggal dan jelas batas-batasnya, ditanami dengan satu atau berbagai jenis tanaman dan masih mempunyai hubungan pemilikan dan atau fungsional yang dimaksudkan disini adalah meliputi hubungan sosial budaya, dan hubungan ekonomi. (Danoesastro, 2008). Menurut Novitasari (2011) pekarangan merupakan tata guna lahan yang digunakan sebagai sistem produksi bahan pangan tambahan dalam skala kecil untuk dan oleh anggota keluarga rumah tangga dan merupakan ekosistem tajuk berlapis.

Setiap orang akan dengan mudah menunjukkan apabila ditanya manapekarangannya atau mana yang disebut pekarangan maka orang segera menunjuk tanah disekitar rumah seseorang atau yang dilihat atau dimilikinya, tetapi walau demikian mudah untuk menunjukkannya secara

nyata tetapi kalau untuk memberi pengertian atau batasan tentang apa yang dimaksudkan dengan pekarangan sering orang mengalami kesulitan. Banyak orang berusaha untuk membuat definisi atau pengertian pekarangan tetapi dari banyak pengertian atau definisi tersebut yang umum digunakan adalah yang dirumuskan oleh Terra (1948), selanjutnya definisi tersebut diperluas oleh Soemarwoto (1975).

Dampak program pemanfaatan lahan pekarangan yang cukup lengkap dikemukakan oleh Saptana *et al.* (2011) dari hasil kajian di Pacitan. Beberapa dampak positif diantaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan konsumsi energi dan konsumsi protein bagi rumah tangga yang melakukan proses pekarangan;
2. Mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pangan. Pengurangan pengeluaran kelompok pangan terbesar secara berturut-turut adalah kelompok sayur, umbi, hasil ternak, dan ikan. Disarankan pengembangan lahan pekarangan harus memperhatikan aspek kebutuhan pangan keluarga dan potensi mengurangi pengeluaran konsumsi, sehingga kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan;
3. Meningkatkan pendapatan rumah tangga. Untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan dapat diintroduksi komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki prospek pasar, maksudnya hasil dari lahan pekarangan bisa dijual kembali;
4. Menciptakan usaha baru bagi para rumah tangga, seperti usaha pembibitan, teknologi penetasan telur ayam arab, kios saprodi, usaha pengolahan hasil pertanian, dan usaha dagang hasil pertanian.

Teknis pemanfaatan lahan pekarangan rumah bisa dilakukan dengan pemanfaatan barang bekas seperti paralon bekas, kaleng bekas, bambu dan lain-lain sebagai tempat media tanam ataupun pengganti pot. Untuk media tanam bisa dari tanah pekarangan yang ditambah kompos dari limbah dapur ataupun pupuk cairnya.

Pekarangan kalau di tanami dengan berbagai jenis tanaman dan tumbuhan pemeliharaan ternak dan ikan sangat banyak manfaatnya karena

pekarangan dapat menghasilkan berbagai bahan pangan yang bergizi tinggi, seperti sayuran, buah-buahan, ternak kecil, unggas dan ikan, di samping itu kalau pekarangan di usahakan dengan baik dapat sebagai sumber pendapatan/tabungan keluarga karena hasil pekarangan bukan hanya untuk di konsumsi tetapi juga dapat di jual sebagai sumber pendapatan keluarga dan kalau di tata dengan baik dapat sebagai penambah keindahan rumah.

2.4.1.2 Tujuan Pemanfaatan Pekarangan Rumah

Tujuan dari pemanfaatan pekarangan adalah untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga, menumbuhkan kesadaran keluarga agar mengenali dan mengetahui sumber – sumber pangan yang ada di sekitar kita, menumbuhkan kesadaran keluarga agar mau dan mampu memanfaatkan bahan pekarangan menjadi sumber pangan dan gizi keluarga (pusat konsumsi dan keamanan pangan, badan ketahanan pangan). Menurut Terra (1967) *dalam* Sajogyo (1994), fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan bahan makanan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya, sayuran dan buah-buahan, rempah, bumbu-bumbum dan wangi-wangian, bahan kerajinan tangan, kayu bakar, uang tunai, hasil ternak dan ikan, serta obat-obatan herbal.

2.1.5 Balai Penyuluh Pertanian

2.1.5.1 Pengertian Balai Penyuluh Pertanian

Kelembagaan penyuluhan merupakan faktor-determinan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dan tercapainya tujuan dari pembangunan pertanian. Kelembagaan penyuluhan diperlukan untuk mewadahi proses penyelenggaraan penyuluhan. Sistem penyuluhan yang dulunya hanya terdiri dari subsubsisten petani, penyuluh dan kelembagaan struktural menjadi subsistem petani, penyuluh, pelaku agribisnis lainnya, lembaga penelitian, pendidikan dan lembaga pelatihan. Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Salah satu mata rantai

lembaga penyuluhan yang terdekat dengan masyarakat dan berada di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Peratanian.

BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) merupakan satuan administrasi pangkal (satminkal) bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kerja balai. BPP memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian sekaligus menjadi cermin keberhasilan pembangunan di wilayah kecamatan. Fungsi BPP adalah untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. BPP merupakan tempat melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan usaha untuk mendukung program swasembada pangan. Strategi dalam upaya meningkatkan produktivitas padi adalah penerapan inovasi teknologi yang sesuai dengan sumberdaya pertanian yang sesuai dengan lokasi masing-masing atau spesifik. Salaman *et al.* (2015), menjelaskan bahwa program penyuluhan berisi informasi tentang kondisi teknis agronomis, kondisi kelembagaan petani, kondisi kelembagaan pendukung kelompok tani, masalah yang dihadapi petani, rencana pemecahan masalah, dan bentuk-bentuk penyuluhan yang akan dijalankan.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit penunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berbagai kegiatan pokok dalam operasional, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan BPP untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus berdasarkan ketetapan atau keputusan Bupati/Walikota. Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal ini aparat Penyuluh Pertanian Lapangan, sarana prasarana, pendanaan serta status kedudukan lembaga yang kuat agar kinerjanya dapat tepat guna (efektif) dan berhasil guna (efesien) dalam pencapaian tujuannya.

BPP sebagai sebuah lembaga yang dekat dengan masyarakat peran dan fungsi BPP sangat besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dalam kegiatan operasionalnya BPP terdiri dari sekelompok penyuluh pertanian dari berbagai subsektor dan dikoordinir oleh seorang diantaranya. BPP juga dibantu oleh tim teknis pertanian secara umum. Tim ini terdiri dari Penyuluh Pertanian Spesial (PPS), peneliti, petani pemandu, Lembaga Swadaya Masyarakat, mantri tani, mantri kesehatan hewan dan teknisi pertanian lapangan lainnya.

BPP adalah “*home base*” bagi kelompok penyuluh pertanian dan desa binaan yang melakukan kontak langsung dengan petani. Penyuluh sebagai staff fungsional di BPP menempati posisi sentral dalam mengaktualisasikan berbagai perannya dan merupakan bagian dari organisasi dan aparatur pemerintah. Dalam kegiatannya BPP berupaya untuk turut aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas dan fungsi BPP adalah menjamin:

1. Tersedianya fasilitas untuk menyusun program dan rencana kerja penyuluhan yang tertib;
2. Tersedianya fasilitas untuk menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi dan pasar;
3. Terselenggaranya kerjasama antara peneliti, PPL, petani/kontak tani-nelayan dan para pelaku agribisnis lainnya;
4. Tersedianya fasilitas untuk kegiatan belajar dan forum-forum pertemuan bagi petani dan bagi penyuluh;
5. Tersedianya fasilitas untuk membuat percontohan dan pengembangan modelmodel usahatani dan kemitraan agribisnis dan ketahanan pangan.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka visi utama BPP adalah berupaya memberdayakan petani melalui penyuluhan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralis. Pendekatan ini mengharuskan penyuluh dan lembaganya untuk memperluas sasaran penyuluhannya dengan tidak hanya

ke petani dan keluarganya tetapi mencakup para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta semua pelaku agribisnis yang terlibat dalam sistem dan usaha agribisnis. Ditinjau dari sisi materi penyuluhan pertanian di samping menyangkut aspek teknis budidaya, harus pula memberikan perhatian tinggi terhadap aspek ekonomi usaha dan pengembangan organisasi petani agar petani dapat mandiri dan mampu melihat peluang serta perkembangan pasar. Dengan demikian BPP dalam kinerjanya harus melakukan perencanaan melalui program penyuluhan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan petani secara kontekstual serta menjadi fasilitator dan motivator bagi petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam mengembangkan usahanya agar berdaya saing dan komersil.

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) adalah kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ditingkat Kecamatan yang merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K). Penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan ditingkat Kecamatan yang sejalan dengan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten.

Melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan program penyuluhan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
2. Memfasilitas pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
3. Melaksanakan peningkatan kapasitas PNS, Penyuluh Swadaya dan THLTBPP melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
4. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan;

5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Kelima penyusunan program tersebut merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam lembaga BP3K. Yang bertujuan supaya proses pelaksanaan kegiatan program penyuluhan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh lembaga itu sendiri.

2.1.5.2 Penyuluhan

Penyuluh dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Carter V (dalam Lucie Setiana, 2005 :hlm. 2), adalah merupakan proses perkembangan pribadi, proses sosial, proses pengembangan keterampilan sesuai profesi serta kegiatan bersama dalam memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan dikembangkan dari masa ke masa oleh setiap generasi bangsa.

Penyuluhan pertanian mempunyai pengertian yaitu proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian).

Penyuluhan pertanian secara teknis dan manajerial dilaksanakan oleh seorang penyuluh yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan dan informasi yang dibutuhkan para petani, sehingga para petani dapat berusahatani lebih baik (Rahmawati *et al.*, 2019). Peran penyuluh pertanian sangatlah dibutuhkan untuk mengarahkan/membimbing para petani dalam meningkatkan keterampilannya, sehingga diharapkan adopsi para petani terhadap teknologi pertanian tinggi dan dapat

meningkatkan hasil produksi petani serta meningkatkan kesejahteraan para petani dan keluarganya.

Penyuluh pertanian adalah usaha mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui, menyadari, mempunyai kemauan dan kemampuan, serta tanggung jawab memecahkan masalahnya sendiri dalam rangka kegiatan usaha tani dan kehidupannya. Kartasapoetra (dalam Lucie Setiana hlm. 2). Penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan luar sekolah untuk anggota masyarakat, terutama yang berada di pedesaan agar meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mentalnya menjadi lebih produktif. Karena tujuan penyuluh pertanian jangka panjang adalah terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat (Lucie Setiana, 2005, hlm. 3).

Menurut Syahyuti (2014), paradigma penyuluhan yang baru memiliki fungsi tidak hanya untuk mentransfer teknologi agar produksi komoditas meningkat, namun pada dasarnya tugas penyuluhan ruang lingkupnya sangat luas, karena mencakup upaya mendidik, mengorganisasikan, dan memobilisasi para petani. Penyuluhan juga merupakan proses memberdayakan para petani yang dilakukan oleh tenaga penyuluh. Penyuluhan memiliki posisi koheren, yakni sebagai sistem pengetahuan yang komprehensif dan tidak terpisah antara penemuan teknologi dan transfernya. Sedangkan para petani memiliki posisi sebagai objek dan subjek kegiatan penyuluhan dan mengingat para petani merupakan aktor atau pelaku utama yang memperoleh manfaat langsung dari kegiatan penyuluhan.

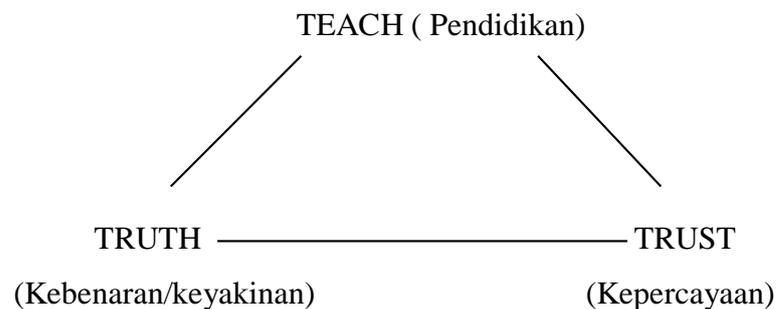
Keberhasilan program penyuluhan pertanian sangat dipengaruhi oleh kapasitas para tenaga penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Kapasitas penyuluh yang rendah akan berdampak pada kegiatan penyuluhan terutama pelaku utama dan pelaku usaha sebagai pengguna jasa penyuluhan (Listiana *et al.*, 2018). Seorang penyuluh pertanian diharapkan mampu menyusun rencana kerja dan melaksanakan penyuluhan berbasis dengan kebutuhan sasarannya yakni petani, kompetensi, dan kinerja seorang penyuluh yang baik sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan program

penyuluhan (Ardita *et al.*, 2017). Menurut Rahmawati *et al.* (2019), kinerja penyuluh pertanian yang baik akan berdampak pada perbaikan kinerja petani dalam mengelola usahatannya, sehingga dapat meningkatkan produksi usahatani.

Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan sehubungan dengan falsafah penyuluhan tersebut (Lucie Setiana, 2005), yaitu sebagai berikut:

1. Penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat, dan bukan bekerja untuk masyarakat;
2. Penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi justru harus mampu mendorong kemandirian;
3. Penyuluh harus selalu mengacu pada terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat;
4. Penyuluh harus mengacu pada peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat umumnya.

Di Amerika Serikat dikembangkan falsafah penyuluhan yang dikenal dengan istilah 3T, yaitu seperti berikut:



Gambar 2.2 Falsafah Penyuluhan

Artinya, bahwa dalam penyuluhan harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendidikan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan;
2. Membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri, oleh karenanya harus ada kepercayaan dari masyarakat sasaran;
3. Belajar sambil melakukan sesuatu, sehingga ada keyakinan atas kebenaran terhadap apa yang diajarkan.

Penyuluh juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, (Lucie Setiana, 2005), yaitu sebagai berikut:

1. Penyuluh adalah proses pengembangan individu maupun kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan harkat dan martabatnya;
2. Penyuluhan adalah pekerjaan yang harus diselaraskan dengan budaya masyarakat setempat;
3. Penyuluh adalah proses dua arah dan harus merupakan pendidikan berkelanjutan;
4. Penyuluh adalah hidup dengan saling berhubungan, saling menghormati dan saling mempercayai;
5. Penyuluh harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk berfikir kreatif, dinamis, dan inovatif;
6. Penyuluh harus mengacu pada kenyataan-kenyataan dan selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.

2.2 Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Yulianto dengan judul “EVALUASI PROGRAM PELATIHAN BAGI PENYULUH PERTANIAN DI BPP KABUPATEN GUNUNGKIDUL”. Peneliti tersebut meneliti dengan menggunakan model evaluasi CIPP.

Berkaitan dengan konteks: Program pelatihan bagi para penyuluh pertanian di BPP Kabupaten Gunungkidul relevan dengan kebutuhan para

penyuluh pertanian, dalam upaya meningkatkan penampilan/kinerja dan ketrampilan penyuluh.

Input : Karakteristik peserta pelatihan adalah PNS fungsional penyuluh pertanian terampil, tingkat pendidikan D3/D4/S1 (95,6%) dan telah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Materi pelatihan sudah cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan sarana prasarana pelatihan.

Proses : Tingkat partisipasi peserta pelatihan baik (80%), keaktifan peserta cukup baik, tugas-tugas dalam pelatihan dikerjakan dengan baik oleh peserta.

Produk : Pelatihan di BPP bermanfaat bagi penyuluh pertanian, dan meningkatkan ketrampilan serta membantu memecahkan permasalahan dalam penyuluhan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Okviyani dengan judul “EVALUASI HASIL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) PELATIHAN KETERAMPILAN TATA RIAS PENGANTIN (STUDI KASUS DI KELURAHAN CIBUBUR JAKARTA TIMUR)“. Peneliti tersebut meneliti mengenai evaluasi CIPP terhadap pelatihan tata rias.

Pada evaluasi konteks yang meliputi aspek tujuan program sudah dikatakan sesuai atau relevan antara satu sama lain. Dimana tujuan program PPMK pelatihan tata rias pengantin ini adalah memberdayakan masyarakat yang kurang terampil, hal tersebut sudah relevan dengan konteks program pelatihan yaitu tata rias pengantin, dimana pelatihan tersebut adalah atas usulan atau ide dari masyarakat yang mempunyai ketertarikan merias tetapi belum mempunyai wadah untuk mengembangkan keterampilannya.

Pada evaluasi input yang meliputi peserta, narasumber, staff pelaksana, sarana dan prasarana serta anggaran dana dan fasilitas pendukung lainnya. Hal tersebut sudah tersedia cukup baik dan sesuai, namun masih ada beberapa kekurangan atau kendala yang dihadapi. Seperti

pada staff pelaksana, seharusnya ada pendampingan khusus dalam pemberdayaan melalui pelatihan tata rias pengantin ini.

Pada evaluasi proses meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pada proses perekrutan dan seleksi seharusnya lebih selektif lagi agar pelatihan ini tepat sasaran, dan untuk pelatihan yang akan datang sebaiknya perekrutan pesertanya adalah untuk peserta lanjutan saja, bukan merekrut peserta baru karena untuk peserta lanjutan semakin paham dan mandiri.

Pada evaluasi hasil terdapat aspek perubahan perilaku peserta dan keberlanjutan usaha atau program. Meskipun ada perubahan perilaku dari peserta secara sosial dan ekonomi, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan keterampilan yang dimilikinya asalkan peserta sering mempraktekan apa yang sudah didapat selama pelatihan, dan secara ekonomi dalam meningkatkan penghasilan keluarga cukup penghasilan tambahan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jaisar Isnan dengan judul “EVALUASI PROGRAM EKSTRAKULIKULER JURNALISTIK MENGGUNAKAN MODEL EVALUASI CIPP (*CONTEXT INPUT PROCESS PRODUCT*) PADA SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 PATI“. Model CIPP merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator.

Model CIPP yang meliputi, yaitu *Context* : evaluasi terhadap konteks, *Input* : evaluasi terhadap masukan, *Process* : evaluasi terhadap proses, *Product* : evaluasi terhadap hasil. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah untuk mengevaluasi ekstrakurikuler jurnalistik siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pati. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu dilihat dari *Context* yang mencakup meliputi tampilan produk program, karakteristik lingkungan program, dan kebutuhan pengguna pada ekstrakurikuler jurnalistik siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pati

telah mencakup sebagian besar kualitas tampilan dan kesesuaian program kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik yang ada sudah sangat baik. Dilihat dari *Input* yang mencakup menentukan sumber-sumber yang ada, rencana dan strategi untuk mencapai tujuan program yaitu tertuang mengenai kedalaman materi yang di sajikan di dalam produk ekstrakurikuler jurnalistik sudah sangat baik.

Dilihat dari *Proses* yang mencakup ketepatan dan kedisiplinan siswa, kesanggupan guru dalam membimbing, pemanfaatan sarana dan prasarana, dan siswa mampu menyelesaikan hambatan, semuanya sudah mampu berjalan dengan cukup baik, tapi perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik.

Dilihat dari *Produk* yang mencakup kualitas desain produk, desain layout, rubrik sesuai dengan tema, dan ketepatan kebutuhan peserta didik sudah sesuai tujuan program yang dapat dinilai sudah sangat baik. Keluaran yang dihasilkan setelah kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pati yang sudah berjalan dengan sangat baik, cukup mempengaruhi peningkatan kualitas belajar siswa, kreatifitas siswa dalam membuat sebuah *produk* yang akhirnya di harapkan siswa mampu menjadi penulis atau wartawan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Husein Baysha dan Endah Resnandari Puji Astuti dengan judul "EVALUASI CIPP (*CONTEXT INPUT PROCESS PRODUCT*) PENERAPAN KURIKULUM SMK". Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 5 Surakarta. Subjek penelitiannya adalah Program Keahlian Teknik Pemesinan. Objek penelitian ini adalah penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian berkaitan 3 pokok pembahasan yaitu pertama, kualitas penerapan kurikulum; kedua, kesulitan-kesulitan penerapan kurikulum; ketiga tingkat kesulitan penerapan kurikulum. Kualitas penerapan kurikulum

meliputi evaluasi input, proses, dan produk. Setiap jenis evaluasi meliputi aspek yang mencakup indikator di dalamnya. Evaluasi input meliputi beberapa aspek yaitu; aspek penerimaan siswa, siswa, guru, kepala sekolah, kurikulum, administrasi pengajaran, media pengajaran, sumber keuangan, sarana dan perlengkapan. Evaluasi proses dilakukan pada aspek pelaksanaan kurikulum. Evaluasi produk dilakukan pada aspek lulusan. Evaluasi konteks merupakan hasil keputusan apakah suatu inovasi kurikulum baru diperlukan atau tidak yang bersifat final.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Petrus Redy Partus Jaya dan Felisitas Ndeot dengan judul “PENERAPAN MODEL EVALUASI *CIPP* DALAM MENGEVALUASI PROGRAM LAYANAN PAUD HOLISTIK INTEGRATIF”. Salah satu penelitian evaluatif dilakukan oleh di PAUD Siwi Kencana, Kota Semarang. Evaluasi program PAUD HI di Satuan PAUD dapat dilakukan oleh satuan PAUD yang bersangkutan dengan berpegang pada Perpres Nomor 60 Tahun 2013 dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD HI. Dalam pelaksanaannya, setiap evaluator dapat memilih berbagai model evaluasi program. Namun, jika melihat kondisi penyelenggaraan PAUD HI yang masih samar-samar dan pemahaman yang belum memadai terkait PAUD HI, maka diperlukan suatu model evaluasi yang komprehensif. Model evaluasi yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi program ini adalah model evaluasi *CIPP*.

Fokus evaluasi konteks adalah analisis kebutuhan (*needs assessment*). Pertanyaan utama dalam komponen ini adalah “apa yang dibutuhkan?”. Dalam konteks penyelenggaraan PAUD HI, pertanyaan utama tersebut dapat dikembangkan menjadi “apa yang dibutuhkan oleh anak usia dini di tingkat satuan PAUD yang dievaluasi?”. Informasi tentang beragam kebutuhan anak usia dini di lingkungan sekitar satuan PAUD dapat diperoleh dari berbagai pihak terkait, yaitu satuan PAUD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BKKBN, Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Polres/Polsek, Organisasi mitra, Posyandu, Tokoh Masyarakat, dan Orang tua. Untuk mengumpulkan

informasi atau data terkait, evaluator dapat menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (diskusi kelompok terfokus) dengan mengundang berbagai *stakeholders* PAUD untuk berdiskusi mengenai kebutuhan esensial anak usia dini di sekitar lingkungan satuan PAUD.

Komponen evaluasi masukan memusatkan perhatian pada rencana dan strategi yang harus dilakukan. Pertanyaan utamanya adalah: “apa yang harus dilakukan (*what should be done*)?”. Rencana apa yang harus dilakukan oleh satuan PAUD?; lembaga/instansi apa saja yang terkait dengan satuan PAUD?; bagaimana koordinasi dan kerjasama satuan PAUD dengan instansi terkait?; Bagaimana program kerja dan *Standard Operational Procedure* (SOP) penyelenggaraan PAUD HI di satuan PAUD?; bagaimana kompetensi tenaga pendidik satuan PAUD?; bagaimana ketersediaan sarana prasarana pendukung? dan, sumber dana/standar pembiayaan?. Beragam pertanyaan evaluatif pada komponen *input* akan ditanyakan kepada berbagai pihak sesuai dengan kapasitas dan proporsi keterkaitan pihak tersebut dengan satuan PAUD. Data evaluasi komponen *input* dapat dikumpulkan menggunakan teknik *Focus Group Discussion*, dokumentasi, observasi, dan kuesioner. Dengan menggunakan teknik *FGD*, evaluator mendapat informasi yang menyeluruh, terbuka sekaligus kredibel terkait koordinasi, kerjasama satuan PAUD dengan instansi lain, sumber dana, standar pembiayaan dan bentuk keterlibatan *stakeholders* di luar satuan PAUD.

Fokus kajian komponen evaluasi proses adalah pelaksanaan program. Pertanyaan kuncinya: “Apakah program sedang dilaksanakan (*Is it being done*)?”. Program layanan PAUD HI terdiri dari 5 jenis layanan, yaitu layanan pendidikan, layanan kesehatan, gizi, dan perawatan, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan. Objek evaluasi komponen proses adalah memastikan keterlaksanaan berbagai program layanan yang telah disebutkan berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan. Selain itu, objek evaluasi juga dapat berkaitan dengan model penyelenggaraan PAUD HI baik yang terpadu maupun terpisah.

Komponen terakhir dalam model evaluasi *CIPP* adalah komponen evaluasi produk. Titik tolak evaluasi pada komponen ini terletak pada pertanyaan: “apakah program sukses (*Did it success*)?”. “Apakah program layanan PAUD Holistik–Integratif telah berhasil?”. “Berapakah tingkat keberhasilan penyelenggaraan PAUD HI di satuan PAUD?”. Ini adalah sejumlah pertanyaan yang menjadi focus kajian evaluasi komponen produk. Selanjutnya, pengembangan pertanyaan evaluasi mengacu pada indikator keberhasilan tiap layanan PAUD HI yang termuat dalam juknis penyelenggaran PAUD HI. Pengukuran tingkat keberhasilan program dimulai dengan mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, *FGD*, dan dokumentasi. Pada konteks ini, teknik observasi dapat menggunakan skala non diskrit untuk memperoleh data-data kuantitatif terkait keberhasilan setiap layanan program PAUD HI. Selain itu, evaluator juga perlu mengumpulkan data-data kualitatif yang menggambarkan persepsi berbagai pihak tentang keberhasilan program. Data-data kualitatif ini dapat diperoleh dengan melakukan diskusi kelompok terfokus (*FGD*). Guna melengkapi informasi kuantitatif dan kualitatif, evaluator dapat menggunakan teknik dokumentasi. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa foto kegiatan layanan pendidikan, buku KMS/KIA, buku DDTK, dokumen kesepakatan satuan PAUD dengan orang tua terkait program *parenting*, dan sebagainya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Wicka Yunita Dwi Utami, Martini Jamaris, dan Sri Martini Meilanie dengan judul “EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN LEMBAGA PAUD DI KABUPATEN SERANG”. Penelitian dilaksanakan di lembaga PAUD yang terakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF tahun 2018 yaitu di TK Al-Hidayah dengan status akreditasi B dan RA Darur Rohmat dengan status akreditasi C. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, observasi, angket dan wawancara.

Komponen *context*, berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa kurikulum disusun oleh lembaga sendiri

dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun tentang Konsep Dasar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 PAUD dan landasan yuridis lainnya yang telah disebutkan di atas. Sesuai dengan hasil angket orang tua bahwa orang tua tidak terlibat dalam penyusunan kurikulum dan hanya mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang akan anak lakukan dan terkadang kegiatan tersebut diinfokan 3 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Tetapi kurikulum yang ada belum dilakukan evaluasi kurikulum, jadi kurikulum yang digunakan tahun ini adalah kurikulum yang sebelumnya. Lembaga menganggap bahwa kurikulum yang ada masih bisa digunakan, maka dari tahun ke tahun memakai kurikulum yang sama hanya diganti tahun dan jadwal pelaksanaan perencanaan pembelajaran dan program/kegiatan, kecuali jika adanya perubahan aturan dalam acuan kurikulum PAUD.

Komponen *input* Berdasarkan hasil pengamatan di kedua lembaga tersebut memiliki struktur organisasi. Pembagian jabatan dalam struktur organisasi tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama dan kepercayaan semua pihak untuk memegang jabatan masing-masing yang ditetapkan. Masing-masing lembaga memiliki jabatan sebagai Kepala PAUD, sekretaris, bendahara dan guru. Di TKS Al-Hidayah, Kepala PAUD merangkap sebagai sekretaris dan bendahara merangkap sebagai guru. Di Al-Hidayah, Kepala PAUD merangkap sebagai bendahara dan sekretaris merangkap sebagai guru. Walaupun rangkap jabatan, mereka tetap melaksanakan tugas secara profesional dan dapat membagi tugasnya dengan baik.

Komponen *process*, Perencanaan pembelajaran belum menjamin kesuksesan proses pembelajaran, karena proses penyampaian atau pengimplementasian dari rencana itulah yang justru menentukan efektivitas dari suatu proses pembelajaran. Maka, dalam kaitan dengan evaluasi proses, kedua lembaga belum memenuhi standar PAUD

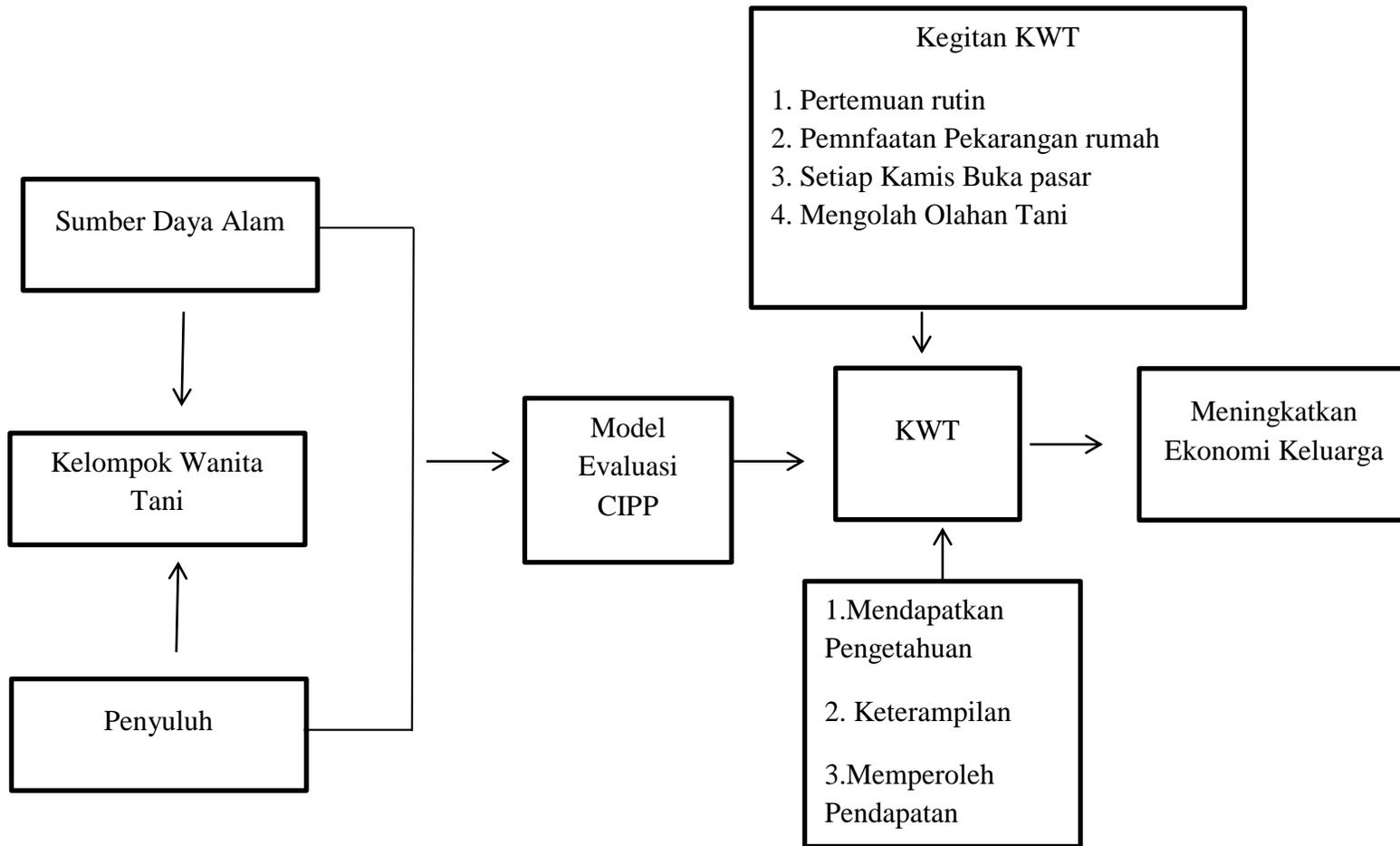
seungguhnya. Di lapangan, penyusunan RPPM dan RPPH belum dilakukan secara maksimal dan tertib, dikarenakan pendidik merasa sudah memiliki RPPM dan RPPH yang sudah jadi dan terkadang kurang dimodifikasi. Selain itu, jika peserta didik terlalu lama mengerjakan atau bahan pembelajaran tidak tersedia, maka jarang RPPH yang telah dibuat jadi bergeser. Selama proses pembelajaran, apresiasi peserta didik sangat bervariasi, ada yang antusias memperhatikan, ada yang terlihat tidak memperhatikan, dan ada juga yang mengalihkan perhatiannya pada aktivitas lain seperti bermain sendiri atau berbicara dengan temannya.

Komponen *product*, perkembangan anak untuk kedua lembaga cukup berkembang dengan baik. Kedua lembaga menggunakan teknik penilaian berbagai macam dalam melakukan penilaian perkembangan. Semua anak di kedua lembaga telah cukup baik memenuhi indikator pencapaian perkembangan. Walaupun dengan kegiatan yang masih monoton, tetapi pendidik terus membantu meningkatkan perkembangan anak bagi anak yang belum memenuhi indikator pencapaian perkembangan. Hal ini perlu terus ditingkatkan oleh pihak sekolah, karena hasil penilaian perkembangan anak sebagai salah satu cermin keberhasilan sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam bukunya *Bissiness Research* (1992) ialah kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai kerangka berpikir dari penelitian ini.

Penelitian ini tentang penerapan model evaluasi CIPP dalam kegiatan Kelompok Wanita Tani mawar bodas. Yaitu salah satu program dari KWT dengan pemanfaatan pekarangan rumah yang ada di sekitar KWT Mawar Bodas. Yang berfokus kepada anggota KWT tetapi tidak banyak dari masyarakat sekitar memnfaatkan pekrangan rumah tersebut karena mnafaat nya sangat terasa dalam meningkatkan ekonomi keluarga.



Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 2.3 kerangka konseptual yang terdiri dari input, process, output, dan outcome. Input data dalam penelitian ini yaitu kelompok wanita tani yang berperan sebagai orang yang di berdayakan oleh penyuluh, prosesnya yaitu dengan melalui model evaluasi CIPP dengan kegiatan pertemuan rutin, pemanfaatan pekarangan rumah, setiap kamis membuka pasar, mengolah olahan tani, output dari penelitian ini mendapatkan pengetahuan, keterampilan, memperoleh pendapat, dan terakhir akan menimbulkan outcome yaitu meningkatkan ekonomi keluarga.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Kerangka konseptual yang telah di kemukakan diatas dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana Proses Penerapan Evaluasi CIPP dalam kegiatan kelompok wanita tani (KWT) oleh Penyuluh ”.